



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



2022

LAPORAN HASIL EVALUASI

PEMERINTAH KAB. KAPUAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu. Selain itu, pemantauan dan evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 31 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses	Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis
1. Rintisan Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .	1. Informasi Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
2. Terkelola Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi	2. Interaksi Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Terstandarisasi Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi	3. Transaksi Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4. Terintegrasi dan Terukur Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif	4. Kolaborasi Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain
5. Optimum Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas	5. Optimalisasi Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

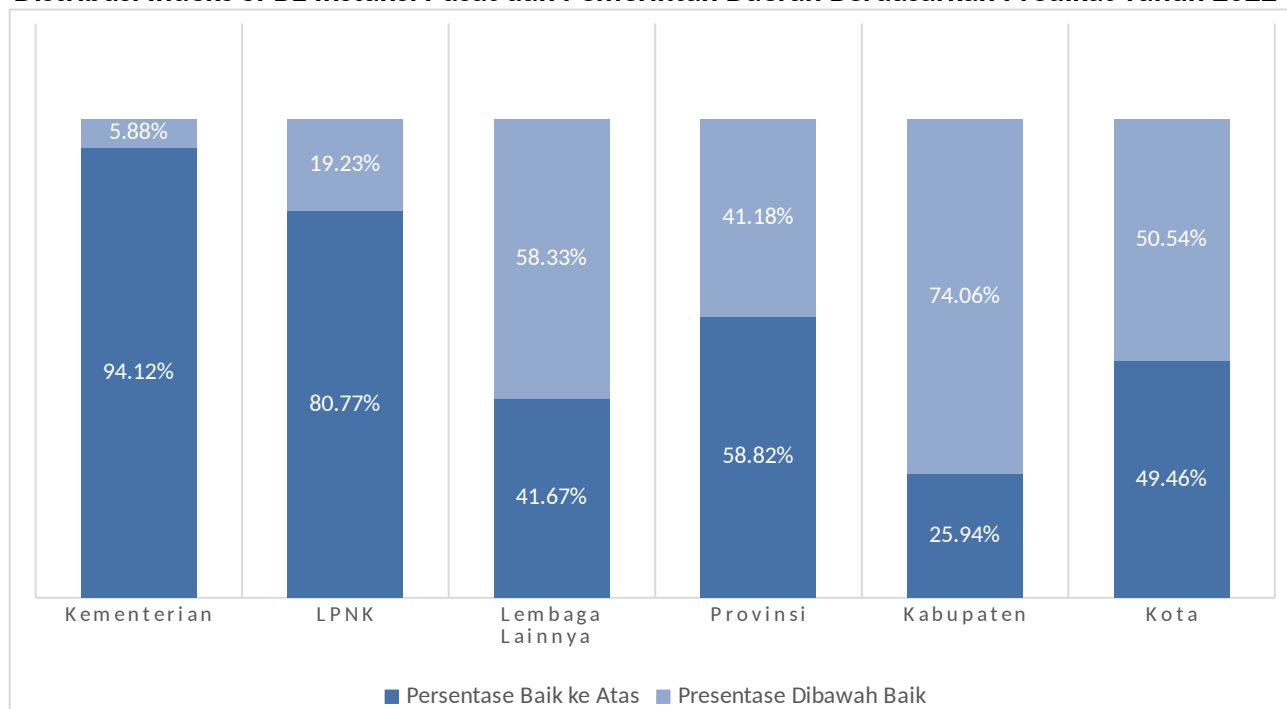
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik *)	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 - 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 - < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 - < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 - < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

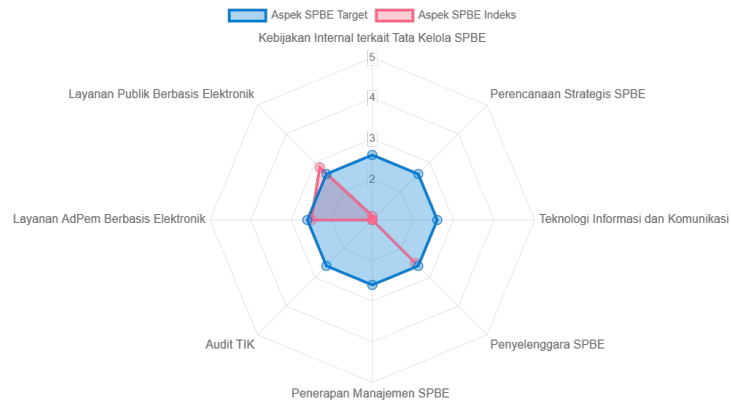
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,35	3,14	2,92	2,33	2,74	2,17	2,50
Domain Kebijakan	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Domain Tata Kelola	1,85	2,86	2,59	1,94	2,27	1,64	1,98
Perencanaan Strategis	1,70	2,63	2,33	1,90	2,00	1,53	1,70
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,92	2,93	2,77	2,04	2,40	1,68	2,11
Penyelenggaraan SPBE	2,02	3,16	2,75	1,83	2,57	1,78	2,28
Domain Manajemen	1,32	2,01	1,64	1,36	1,51	1,21	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	1,35	2,14	1,62	1,37	1,55	1,23	1,41
Audit TIK	1,24	1,66	1,69	1,34	1,38	1,15	1,23
Domain Layanan SPBE	2,97	3,72	3,58	2,86	3,45	2,79	3,18
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,03	3,71	3,58	3,07	3,46	2,85	3,23
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,89	3,74	3,58	2,55	3,44	2,71	3,09

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2022



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	1,83
Domain Kebijakan SPBE	1,10
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>1,10</i>
Domain Tata Kelola SPBE	1,30
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>1,00</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>1,00</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>2,50</i>
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>1,00</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>1,00</i>
Domain Layanan SPBE	2,63
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>2,50</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>2,83</i>

Kekuatan dan Kelemahan

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan aspek pada kebijakan internal terkait tatakelola SPBE di Kab. Kapuas masih belum terpenuhi dan memiliki nilai kurang (1,10). Indikator 10 (kebijakan internal tim koordinasi SPBE) dengan tingkat nilai kematangan 2, dan 9 indikator lainnya semua berada pada tingkat kematangan level 1

- **Kekuatan**
Tidak dijumpai adanya unsur unsur keunggulan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE di Kab Kapuas.
- **Kelemahan**
Adapun sisi kelemahan dari aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE ini dapat dijumpai pada 9 indikator yang semuanya berada pa titik kematangan level 1. Indikator indikator tersebut antara lain indiaktor 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 dan 1 indikator berada pada level 2

B. Perencanaan Strategis SPBE

Pemenuhan aspek ini belum dapat terpenuhi (1,00). Pemerintah Kab. Kapuas belum memiliki peraturan atau dokumen yang terkait dengan aspek Perencanaan Strategis SPBE

- **Kekuatan**
Tidak ada unsur kekuatan dalam aspek ini, karena Pemerintah Kab. Kapuas belum memiliki peraturan atau dokumen yang terjait dengan aspek Perencanaan Strategis SPBE
- **Kelemahan**
Pemerintah Kab. Kapuas belum memiliki peraturan atau dokumen yang terkait dengan Perencanaan Strategis SPBE

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemenuhan aspek teknologi informasi dan komunikasi di Kab Kapuas belum terpenuhi, dan semua indikator 15,16,17 dan 18 tingkat kematangannya berada di level 1.

- **Kekuatan**
Tidak ditemui adanya unsur unsur kekuatan pada aspek teknologi informasi dan komunikasi pada penerapan SPBE di Kab Kapuas.
- **Kelemahan**
Semua inidikator yang ada dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi merupakan titik lemah dalam penerapan SPBE di Kab Kapuas. Kelemahan kelemahan tersebut yaitu: 1) : Proses pembangunan Aplikasi SPBE dilakukan secara adhoc dan belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi 2) , Layanan Pusat Data di Kabupaten Kapuas karena tiadanya data dukung yang disertakan, mengindikasikan belum tersedianya Layanan Pusat Data yang digunakan 3)Layanan Jaringan Intra di Kabupaten Kapuas karena tiadanya data dukung yang disertakan, juga mengindikasikan bahwa Layanan Jaringan Intra belum tersedia 4) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan di Kabupaten Kapuas karena data dukung yang disertakan tidak dapat mencerminkan adanya penggunaan sistem penghubung layanan. Setidaknya ada data dukung seperti link/web address user interface untuk konfigurasi SPL dan screen shot konfigurasi middleware/sistem penghubunginteroperabilitas/integrasi antar aplikasi/data/layanan SPBE

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada aspek penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi dan memiliki nilai baik oleh Kabupaten Kapuas meliputi indikator Kolaborasi Penerapan SPBE dengan masing masingnya memiliki nilai tingkat kematangan level 3

- **Kekuatan**
Kekuatan pada aspek Peyelenggara SPBE di Kabupaten Kapuas tidak ditemui pada 2 indikator dari aspek Penyelenggara SPBE ini karena semua indikator SPBE yang ada : Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE dengan tingkat pemenuhan kematangan berada pada level 2 dan 3.
- **Kelemahan**
Kelemahan pada aspek peneyelenggara SPBE di Kabupaten Kapuas dijumpai pada indikator Tim Koordinasi SPBE dengan tingkat pemenuhan kematangan berada pada level 2

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan Aspek Penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Kapuas belum dapat terpenuhi (1), semua 8 indikator pada aspek ini mempunya nilai tingkat kematangan level 1.

- Kekuatan
Pada aspek penerapan manajemen SPBE tidak dijumpai adanya unsur kekuatan dalam aspek ini, karena Pemerintah Kab. Kapuas belum memiliki (atau setidaknya tidak ada data dukung yang tersedia/sesuai yang menunjukkan adanya) dokumen terkait Penerapan manajemen SPBE
- Kelemahan
Pemerintah Kab. Kapuas belum menerapkan manajemen SPBE (belum tersedia data dukung/dokumen terkait yang dapat menunjukkan adanya penerapan manajemen SPBE). Semua 8 indikator dalam aspek ini merupakan titik lemah dalam penerapan manajemen SPBE, dan nilai tingkat kematangan indikatornya berada pada level 1.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan pemenuhan Aspek Audit TIK di Kabupaten Kapuas belum dapat terpenuhi (1), semua 3 indikator pada aspek ini yaitu pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, pelaksanaan audit aplikasi SPBE, dan pelaksanaan audit Keamanan SPB mempunyai nilai tingkat kematangan level 1.

- Kekuatan
Pada aspek Audit TIK tidak dijumpai adanya unsur kekuatan dalam aspek ini, karena Pemerintah Kab. Kapuas belum menerapkan audit TIK, baik audit infrastruktur, audit aplikasi maupun audit keamanan SPBE. Tidak ada data dukung yang sesuai yang menunjukkan adanya pelaksanaan audit SPBE.
- Kelemahan
Pemerintah Kab. Kapuas masih belum menerapkan audit TIK. Semua indikator yang ada 29, 30 dan 31 merupakan kelemahan dari aspek ini

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kapuas terpenuhi dan memiliki nilai baik (2,6). Pemenuhan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Murung Raya dari 10 indikator memiliki tingkat kematangan berkisar antara 1- 4. Indikator yang tidak memenuhi ada pada indikator 38 pengelolaan barang milik negara, 39 layanan pengawasan internal pemerintah dan 41 layanan kinerja pegawai dengan tingkat kematangan berada pada level 1. Adapun indikator yang memenuhi antara lain Indikator layanan kepegawaian dengan menggunakan SIASN dan layanan akuntabilitas kinerja organisasi (e-sakip) dengan tingkat kematangan 3, Sedangkan indikator layanan perencanaan (SIPD), layanan penganggaran(SIPD), layanan keuangan (SIPD), pengadaan barang dan jasa(SPSE) serta layanan kearsipan dinamis (srikandi) semuanya memenuhi dan berada pada tingkat kematangan level 4.

- Kekuatan
Kekuatan aspek layanan administratif pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Kapuas terletak pada penggunaan aplikasi umum bagi pakai yaitu pada indikator layanan perencanaan (SIPD), layanan penganggaran(SIPD), layanan keuangan(SIPD), layanan pengadaan barang dan jasa (SPSE) serta layanan kearsipan dinamis (srikandi) semuanya berada pada tingkat kematangan level 4.
- Kelemahan
Kelemahan pada aspek layanan administratif pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Kapuas terdapat pada indikator 38 pengelolaan barang milik negara, indikator 39 layanan pengawasan internal pemerintah dan indikator 41 layanan kinerja pegawai yang berada pada tingkat kematangan level 1. Kelemahan pada Layanan Pengelolaan Barang milik daerah di Kabupaten Kapuas dari aplikasinya yang ada hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik daerah. Disarankan untuk menggunakan aplikasi umum bagi pakai seperti SIAP BMD yang dikembangkan kementerian yang telah mempunyai tingkat kematangan mencapai level 3 sampai dengan 4. Disamping itu kelemahan terjadi di Kabupaten Kapuas dalam penggunaan aplikasi umum bagi pakai untuk layanan pengawasan internal pemerintah. Karena menggunakan aplikasi umum bagi pakai e-LHKPN yang dikembangkan KPK dan tidak biasa digunakan layanan pengawasan internal pemerintah. Disarankan untuk menggunakan aplikasi umum bagi pakai untuk Layanan Pengawasan Internal Pemerintah seperti SPIP yang dikembangkan oleh BPKP (tingkat kematangan 3 sampai dengan 5) dan aplikasi SIJAGA (tingkat kematangan 2-4) dan GOL-online yang dikembangkan oleh KPK (3,4 dan sampai 5)..

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pemenuhan aspek layanan publik berbasis Elektronik di Kab Kapuas secara keseluruhan terpenuhi dengan predikat baik (2,83). Layanan Data Terbuka dan layanan Publik sektor 3 masih belum terpenuhi dengan masing masing indikator memiliki tingkat kematangan level 1. dan Layanan jaringan dokumentasi

dan informasi hukum dengan menggunakan JDIH juga masih belum terpenuhi dengan tingkat kematangan level 2, dan layanan publik sektor 1 menggunakan sistem informasi manajemen gedung tingkat kematangannya berada di level 3. Adapun layanan pengaduan pelayanan publik menggunakan SP4N L@POR dan layanan publik sektor 2 dengan menggunakan OSS ke dua duanya tingkat kematangannya berada di level 4

- Kekuatan

Kekuatan pada aspek layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Kapuas dapat dijumpai pada indikator layanan pengaduan pelayanan publik menggunakan SP4N L@POR dan layanan publik sektor 2 dengan menggunakan OSS ke dua duanya tingkat kematangannya berada di level 4

- Kelemahan

Kelemahan pada aspek layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Kapuas dapat dijumpai pada indikator Layanan Data Terbuka dan layanan Publik sektor 3 dengan masing masing indikator memiliki tingkat kematangan level 1. Layanan JDIH juga masih merupakan titik lemah dengan tingkat kematangan level 2

Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki layanan pemerintahan berbasis elektronik yang baik (2,83) dan layanan publik berbasis elektronik yang cukup (2,60). Hanya saja 5 aspek lainnya terkait perencanaan strategis SPBE masih kurang (1,00), Teknologi Informasi dan Komunikasi, juga masih kurang (1,00), Penerapan manajemen SPBE yang juga kurang (1,00), dan audit TIK masih kurang (1,00) serta aspek kebijakan internal tatakelola SPBE yang juga masih kurang (1,10). Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Kapuas diperoleh predikat yang cukup dalam penerapan SPBE (1,858) dengan berapa keunggulan dan kelemahan yang ada.

Adapun yang menjadi keunggulan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas adalah pada aspek penyelenggara yang dinilai cukup (2,5). Upaya lebih baik untuk mengkomunikasikan program kerja kepada seluruh perangkat daerah perlu untuk dilakukan dan disarankan juga untuk melakukan rapat evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SPBE. Kesan bahwa SPBE hanya merupakan tanggung jawab dinas kominfo harus dapat dihilangkan. Aspek lain juga dinilai baik adalah aspek layanan pemerintah berbasis elektronik (2,6). Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi umum bagi pegawai untuk menunjang layanan indikator 32,33,34,35,36, 37 dan 40 telah memperoleh tingkat kematangan level 4,4,4,4,3, 4 dan 3 sesuai dengan tingkat kematangan aplikasi bagi pegawai tersebut. Penggunaan aplikasi umum SIPD untuk layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan aplikasi SPBE untuk layanan pengadaan barang dan jasa SIASN untuk layanan kepegawaian, Srikandi untuk layanan kearsipan dinamis, dan e-sakip untuk layanan kinerja organisasi telah mengantarkan pada nilai aspek layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik yang baik. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa semestinya hal ini dapat dilakukan untuk layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik lainnya dan juga untuk layanan publik berbasis elektronik. Disarankan bahwa penggunaan common apps (aplikasi umum bagi pegawai) seyogyanya dapat digunakan dengan baik atau dapat ditempuh dengan melakukan replikasi dari layanan publik sejenis yang telah berhasil diimplementasikan dengan baik oleh instansi lainnya.

Sedangkan dari aspek layanan publik berbasis elektronik dinilai baik (2,83). Hal ini juga ditopang karena penggunaan aplikasi umum guna pegawai SP4N L@POR untuk layanan pengaduan publik, dan informasi hukum dan OSS untuk layanan publik sektor 2. Layanan JDIH yang telah digunakan pun mempunyai potensi untuk ditingkatkan level penggunaannya di Kabupaten Kapuas.

Adapun yang menjadi kelemahan dari penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas ini terletak pada 5 aspek, yaitu terkait aspek perencanaan strategis SPBE masih kurang (1,00), Teknologi Informasi dan Komunikasi, juga masih kurang (1,00), Penerapan manajemen SPBE yang juga kurang (1,00), dan audit TIK masih kurang (1,00) serta aspek kebijakan internal tatakelola SPBE yang juga masih kurang (1,10)

Apresiasi perlu diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah memiliki aspek penyelenggara yang dinilai baik dan telah menggunakan berbagai aplikasi layanan baik untuk layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan baik (dan berbagai layanan publik berbasis elektronik dengan baik juga). Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Kapuas secara umum telah berhasil menggunakan aplikasi umum guna pegawai untuk layanan pemerintahan dan layanan publiknya. Apabila penerapan aplikasi umum bagi pegawai telah diterapkan dengan baik, hal ini akan dapat mendorong budaya penggunaan dan pemanfaatan aplikasi layanan lainnya. Tentu saja agar penerapan SPBE ini dapat berjalan dengan baik diperlukan perhatian yang besar dan upaya yang sungguh-sungguh memperbaiki aspek-aspek lainnya yang masih lemah. Keberadaan peraturan yang mengatur kebijakan internal tatakelola SPBE perlu segera direalisasikan dengan mengacu pada peraturan tata kelola SPBE nasional yang ada. Demikian juga semua dokumen terkait perencanaan strategis SPBE yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan SPBE Nasional.

Selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan setelah itu secara khusus memperhatikan hal terkait penyelenggara SPBE. Upaya lebih baik untuk mengkomunikasikan program kerja kepada seluruh perangkat daerah perlu untuk dilakukan dan disarankan juga untuk melakukan rapat evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SPBE. Hal ini harus menjadi perhatian dari tahun ke tahun penyelenggaraan SPBE. Disarankan untuk melakukan berbagai inisiatif yang memungkinkan penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini dapat dilakukan bila berbagai aspek 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dilakukan upaya perbaikan. Pencermatan terhadap kriteria pemenuhan capaian indikator SPBE, misalnya sebagaimana diatur dalam PermenPANRB No. 59 Tahun 2020, perlu dilakukan dengan sekasama, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE berikutnya berbagai kriteria pemenuhan indikator dapat dijadikan sebagai acuan program pengembangan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3